

PERAN KOMUNIKASI POLITIK MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI KOTA LHOKSEUMAWE

Syukur Kholil*, Zulkarnaini Abdullah, Attarmizi*****

*Prof. Dr., MA Co Author Guru Besar Pascasarjana UIN Sumatera Utara

**Dr., MA Co Author Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara

*** Mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Abstract: In this study, according to the author it is important to do in order to see the understanding and practice of politics MPU on the settlement of the conflict. The practice is meant is the participation of scholars in an effort to drown out the various types of conflict such as those between Indonesia and GAM, between the central government and a number of giant companies that exist around Lhokseumawe, between the political elite and the government with NGOs in addition to reviewing the settlement of business they do. This research is a field research, by taking some data collection techniques are the first in-depth interviews with six scholars as the samples were taken by purposive sampling, ie scholars who joined the MPU. In this thesis, the author discusses the position of ulama in Aceh society and also the history of the growing conflict in Aceh and Lhokseumawe impact on society. In addition it also explained the history of the ulama Aceh quick active role in resolving conflicts in various areas of public life, and not least also need to explain what should be done by the MPU in the resolution of political conflicts. Based on the results found in the field is MPU as a forum for scholars in the city of Lhokseumawe is a group of people who respected and admired, and are expected to play an active role in society. MPU Lhokseumawe not a passive group in political matters, as well as the notion some people, but active role within the scientific task of scholars.

Dalam penelitian ini, menurut penulis penting untuk dilakukan dalam rangka untuk melihat pemahaman dan praktek politik MPU terhadap penyelesaian konflik. Praktek yang dimaksudkan adalah peran serta ulama dalam upaya meredam berbagai jenis konflik seperti yang terjadi antara RI-GAM, antara pemerintah pusat dengan sejumlah perusahaan raksasa yang ada disekitar Lhokseumawe, antara para elit politik dan pemerintah dengan LSM disamping mengkaji usaha penyelesaian yang mereka lakukan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menempuh beberapa teknik pengumpulan data yaitu *pertama* wawancara mendalam (*depth interviem*) dengan 6 ulama yang dijadikan sampel yang diambil dengan teknik *purposive sampling*, yaitu ulama yang bergabung dalam MPU. Dalam tesis ini penulis membahas tentang kedudukan ulama dalam masyarakat Aceh dan juga sejarah konflik yang berkembang di Aceh serta dampaknya terhadap masyarakat Lhokseumawe. Selain itu menjelaskan pula sejarah ringkas peran aktif ulama Aceh dalam menyelesaikan konflik dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, dan tak kalah pentingnya pula perlu dijelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh MPU dalam penyelesaian konflik politik. Berdasarkan hasil yang ditemukan di lapangan adalah MPU sebagai wadah ulama di Kota Lhokseumawe merupakan kelompok masyarakat yang dihormati dan disegani serta diharapkan berperan aktif dalam masyarakat. MPU Lhokseumawe bukan kelompok yang pasif dalam persoalan politik, sebagaimana anggapan sementara orang, tapi aktif melakukan perannya dalam batas tugas keilmuan ulama.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Majelis Permusyawaratan Ulama, Konflik

Latar Belakang Masalah

Aceh dikenal dengan julukan “Serambi Makkah”¹ masyarakatnya yang religius sangat menghargai ulama. Penghargaan ini masih dirasakan sampai sekarang. Kalaupun terjadi sedikit pergeseran, itu disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya. Faktor interen, yaitu dari dalam pribadi ulama itu sendiri, dan faktor eksteren, yaitu dari luar, baik faktor politik maupun faktor perubahan dan perkembangan zaman yang menyebabkan perubahan-perubahan sosio-kultural masyarakat Aceh sendiri.

Penghargaan masyarakat Aceh terhadap ulama dapat dilihat dalam perspektif perkembangan Islam dan Raja-raja Aceh antara lain Malik al-Zahir (1927-1326 M) salah seorang Sultan Pasai, Putra Sultan Malik as-Shaleh, sangat gemar mengkaji dan mendiskusikan masalah-masalah agama dengan para ulama yang datang dari berbagai negara Islam lainnya, seperti ; Syarif Amir dari Delhi, Kadi Amir Sayyid dari Syiraz dan ahli hukum Taj’al-Din dari Isfahan dan para ulama lainnya.

Demikian juga, Istana Sultan dijadikan sebagai pusat pengkajian Islam (*Islamic Centre*) secara rutin dan terjadwal dengan baik. Berbagai disiplin Ilmu dibahas didalamnya. Diantara mereka ada yang diangkat sebagai penasihat Sultan dalam urusan negara dan agama, dengan gelar “*makhdlum*” seperti dipergunakan di India, juga dipergunakan di Kerajaan Pasai.² Demikian pula gelar “*Syaykh al-Islam*” yang diberikan kepada ulama di zaman kesultanan Aceh.³

Aceh dalam lintasan sejarah adalah sebuah indentitas yang independen serta unik. Aceh yang memiliki hamparan geografis yang strategis, telah membuat bangsa ini memiliki keragaman suku, etnis dan juga sejarah.⁴ Bagi Aceh, keragaman ini telah menorehkan tinta emas dalam perjalanan sejarahnya. Keberagaman tersebut-lah yang telah membawa Aceh menjadi indentitas yang kosmopolit, egaliter, dan progresif terhadap gagasan baru, selama tidak mengganggu indentitas sejatinya.⁵

Keunikan ini semakin mendapatkan bentuknya, ketika di Aceh, tepatnya di Kerajaan Samudera Pasai, sulthan memeluk agama Islam, bahkan menjadikannya sebagai agama resmi negara. Ajaran Islam yang menekankan kepada nilai-nilai kemanusiaan, seperti kesetaraan, keadilan, pluralisme dan progresifitas ternyata mendapatkan bentuk yang tepat di Aceh. Karakter inilah yang dibawa oleh kerajaan di Aceh sesudahnya, seperti kerajaan Peureulak dan Aceh Darussalam yang bertempat di Banda Aceh. Keberadaan dua kerajaan besar tersebut tetap mewakili semangat Islam, sehingga melanjutkan usaha penyebaran Islam yang telah dirintis oleh kerajaan Samudera Pasai di Nusantara⁶.

Kemajuan berarti ini didapati sebagai akibat dari keberadaan Islam di Aceh yang tidak jauh dari institusi negara. Dimana para pemimpin yang dibantu para alim ulama menjadikan agama Islam sebagai agama utama untuk kerajaannya. Di masa mendatang hal tersebut berdampak pada keterlibatan ulama MPU dalam perdamaian Aceh dengan tidak meninggalkan khas Aceh yang religius progresif.⁷

Dengan kewibawaan ulama yang sangat strategis dalam masyarakat Aceh, tidaklah mengherankan kalau tokoh-tokoh pemerintahan di Aceh berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan dukungan dari para ulama dalam upaya mengatur pemerintahan. Ulama adalah figur ideal bagi masyarakat, ulama juga orang yang bertanggungjawab sebagai da’i dan pemberi solusi segala permasalahan yang dihadapi oleh umat dalam masyarakat. Seorang ulama mesti mengendalikan masyarakat menurut nash-nash yang telah digariskan oleh syarak melalui al-Qur’an dan al-Sunnah.

Karena kedisiplinan ilmu dan pengaruhnya, ulama dan umara mempunyai hubungan dan tanggung jawab terhadap pembinaan umat sehingga pembentukan lembaga Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Aceh menjadi wadah para ulama (sesuai bidang/komisi masing-masing) lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah (jalur koordinasinya ke MUI Pusat). Tanggung jawab yang diemban ini diperkuat oleh surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 451.7/1754/1982 tanggal 1 Desember 1982.⁸ Sebagai realisasi dari Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang diadakan pada tahun 1975. Meskipun demikian, seperti dikatakan oleh Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA (Mantan Ketua MPU) bahwa lembaga ulama belum lagi kondusif untuk dapat berkiprah.⁹ Namun, Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh melalui wadahnya bersama lembaga terkait telahkses sehingga melahirkan Perda Nomor 3 Tahun 2000 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, dan kemudian diamandemen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

MPU merupakan suatu lembaga non pemerintahan yang dibentuk untuk memberikan masukan, pertimbangan dan saran dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan terhadap kebijakan daerah. Sebagai sebuah lembaga yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam atau memiliki disiplin ilmu dan sifat-sifat tertentu dikategorikan ulama dan peran ulama sangat menonjol dalam penyelesaian konflik Aceh terutama pada tahun 2006 sampai 2014. Peran-peran ini dilakukan dalam bentuk mediator untuk mencari solusi perdamaian antara pihak yang bertikai. Peran ini dapat dilakukan oleh ulama karena mereka dapat menjalin komunikasi dengan kedua belah pihak. Di satu sisi, pihak pemerintah ketika ingin memutuskan solusi yang akan diberikan untuk Aceh selalu mendengarkan saran-saran dari ulama. Di sisi lain, para pengurus MPU juga memiliki ruang komunikasi dengan para petinggi GAM di daerah-daerah. Kondisi ini memberi kesempatan yang luas kepada MPU untuk mengambil peran dalam upaya penyelesaian konflik intern yang terjadi di kota Lhokseumawe. Karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Peran Komunikasi Politik Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Menyelesaikan Konflik di Kota Lhokseumawe.

Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah sebuah studi yang dibangun atas berbagai disiplin ilmu, terutama dalam hubungannya dengan proses komunikasi dan proses politik. Komunikasi politik merupakan wilayah pertarungan dan dimeriahkan oleh persaingan teori, pendekatan, agenda dan konsep dalam membangun jati dirinya. Oleh karena itu, komunikasi yang membicarakan tentang politik kadang diklaim sebagai studi tentang aspek-aspek politik dari komunikasi publik, dan sering dikaitkan sebagai komunikasi kampanye pemilu (*election campaign*) karena mencakup masalah persuasi terhadap pemilih, debat antar kandidat, dan penggunaan media massa sebagai alat kampanye.

Lucian Pye berpendapat bahwa antara komunikasi dan politik memiliki hubungan yang erat dan istimewa karena berada dalam kawasan (domain) politik dengan menempatkan komunikasi pada posisi yang sangat fundamental.¹⁰ Galnoor misalnya mengatakan bahwa “tanpa komunikasi, tidak akan ada usaha bersama, sehingga tidak ada politik.” Pernyataan lain dari pye bahwa “tanpa suatu jaringan (komunikasi) yang mampu memperbesar (*enlarging*) dan melipatgandakan (*magnifying*) ucapan-ucapan dan pilihan-pilihan individual, tidak akan ada namanya politik.” Bahkan Wilbur Schramm, tokoh peletak dasar ilmu komunikasi, menempatkan seorang ilmuwan politik terkemuka, yakni Harold D’Lasswell pada urutan pertama dari empat orang yang disebutnya bapak pendiri (*the founding fathers*) ilmu komunikasi melalui karyanya yang diangkat dari disertasi doktranya, yaitu *Propaganda Tehnique in the World War* (1927). Lasswell bersama dengan Ralph D. Casey dan Bruce L. Smith kemudian menyusun *Propaganda and Promotional Activities; Annotated Bibliography*, lalu dikembangkan menjadi buku “*Propaganda, Communication, and Public Opinion: A Comprehensive Reference Guide*” (1956).¹¹

Ilmuwan politik yang memiliki peranan dalam menghubungkan antara ilmu politik dan komunikasi diantaranya adalah para murid Lasswell antara lain: Ithiel de Sola Pool, V.O. Key, dan Gabriel A. Almond. Pool (1917-1984) adalah seorang dosen dan pernah memimpin Departemen Ilmu Politik dan Direktur Program Riset mengenai Komunikasi Internasional di MIT (*Massachusetts Institute of Technology*). Almond dalam Alfian (1990) melihat bahwa komunikasi merupakan salah satu masukan yang menentukan bekerjanya semua fungsi dalam sistem politik. Ia diibaratkan sebagai suatu sistem sirkulasi darah dalam tubuh yang mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes, dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) pemrosesan sistem politik. Komunikasi politik menyambungkan semua bagian dari sistem politik hingga aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan. Bila komunikasi itu berjalan lancar, wajar, dan sehat menurut Alfian (1990), sistem politik akan mencapai tingkat kualitas responsif yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan kepentingan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman.

Key mempertemukan pembahasan komunikasi dengan disiplin politik melalui bukunya *Public Opinion and American Democracy*, lalu Almond yang juga dikenal sebagai profesor ilmu politik meletakkan dasar-

dasar konseptual untuk menganalisis fungsi komunikasi dalam tatanan suatu sistem politik. Profesor ilmu politik lain, Frederick W. Prey menulis tentang komunikasi dan pembangunan, Karl W. Deutsch menulis *Nationalism and Social Communication*. Walter Lippman yang memelopori pembahasan tentang opini publik, lalu Paul L. Lazarsfeld menulis *The People's Choice* (1944), Barelson mengenai *Voting: A Study of Opinion Formation in Presidential Campaign* (1954) lalu *The Voter Decides* (1960) oleh Campbell dan kawan-kawan. Dari berbagai kajian yang mencoba menghubungkan kedua konsep ini, yakni politik dan komunikasi, akhirnya dapat dikemukakan bahwa hampir tidak ada suatu buku atau publikasi yang membahas tentang komunikasi luput dari pembahasan yang berkaitan bidang politik (Nasution, 1990).

Meskipun upaya untuk mempertemukan dua bidang ilmu yang berbeda bukan pekerjaan mudah, hal itu tidak boleh mengurangi minat untuk menggali lebih dalam bidang studi yang sifatnya interdisipliner karena memiliki persentuhan dengan banyak bidang ilmu. Teori perkawinan silang (*breeding system*) yang mempertemukan dua genetik yang berbeda, dapat diaplikasikan dalam pengembangan dua disiplin ilmu yang berbeda pula sehingga melahirkan banyak ilmu baru, seperti halnya disiplin Komunikasi Politik.

Dalam *Rogers Trusty Thesaurus*, pelaku politik (politisi) diartikan sama dengan perbuatan korupsi, pembuat rusuh, tukang protes, penipu dan semacamnya. Politik dicitrakan dengan perbuatan tidak jujur, curang, tega, kotor, dan jahanam. Dengan kata lain, politik diartikan sebagai sebuah penyimpangan perilaku yang keluar dari tatanan kehidupan normal. Dalam sebuah survei yang dilakukan pada tahun 1977 oleh perusahaan jajak pendapat Gallup, ditemukan bahwa 23% penduduk Amerika tidak menginginkan anak-anaknya memilih profesi sebagai politisi (Ranney, 1990).

Dari beberapa pengertian di atas, jelas komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik. Faktor ini pula yang membedakan dengan disiplin komunikasi lainnya seperti komunikasi pembanguan, komunikasi pendidikan, komunikasi bisnis, komunikasi antar budaya, komunikasi organisasi, komunikasi keluarga dan lain semacamnya. Perbedaan itu terletak pada *isi pesan*. Artinya komunikasi politik memiliki pesan yang bermuatan politik, sementara komunikasi pendidikan memiliki pesan yang bermuatan masalah-masalah pendidikan. Jadi untuk membedakan antara satu disiplin dengan disiplin lainnya dalam studi ilmu komunikasi, terletak pada sifat atau isi pesannya.

Kedudukan Ulama Pada Masyarakat Aceh

Dalam masyarakat Aceh, ulama dipanggil dengan sebutan teungku, namun tidak semua panggilan teungku merujuk pada figur ulama. Terminologi teungku merupakan terminologi yang masih bersifat general, istilah teungku sering digunakan dalam keseharian, seperti dalam menyapa seseorang yang baru dikenalnya, menyambut tamu yang belum dikenal, panggilan bagi orang yang sedang menuntut ilmu agama, dan panggilan seseorang murid terhadap gurunya.

Dalam memperoleh gelaran keulamaan dalam masyarakat Aceh, ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, individu tersebut mempunyai pengetahuan agama Islam yang luas. Kedua, individu tersebut mendapatkan pengakuan (legitimasi) dari masyarakatnya. Syarat pertama dapat dipenuhi setelah seseorang menempuh masa belajar agama Islam yang cukup lama, sedangkan syarat kedua adalah setelah masyarakat melihat ketaatan dari seseorang terhadap ajaran agama Islam. Apabila seseorang memiliki pengetahuan agama yang luas dan tinggi, tetapi jika tidak diamalkan maka orang tersebut tidak akan mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai seorang ulama. Pengakuan sebagai seorang ulama harus diiringi dengan penghormatan terhadap orang yang telah diakui tersebut. Sedangkan bagi orang yang mengetahui agama dengan luas tetapi tanpa diamalkan, maka individu tersebut tidak diakui dan tidak dihormati terhadap keulamaannya, bahkan mendapatkan celaan masyarakat.¹²

Dalam masyarakat Aceh golongan ulama adalah salah satu kelompok yang sangat penting, antara lain karena kedudukannya sebagai pemimpin-pemimpin informal, dalam jalur sejarah masyarakat Aceh ditemukan masa-masa, pada waktu dimana hubungan antara ulama dan masyarakatnya sangat harmonis. Salah satu contoh yang paling utama ialah pada masa perang kolonial Belanda di Aceh. Para ulama pada masa itu berada pada kedudukan yang dominan dalam masyarakat. Kedudukan ulama yang demikian,

tidak saja disebabkan oleh karena ulama yang dianggap oleh masyarakat sebagai orang-orang yang berilmu tinggi, tetapi juga sebagai pemimpin-pemimpin dan panglima perang. Mereka juga senantiasa dapat membaca tanda-tanda zaman (interpretasi situasional) berdasarkan nilai agama.

Sejarah Konflik Aceh

Konflik Aceh merupakan salah satu konflik laten yang tunasnya telah tumbuh sejak masa-masa awal kemerdekaan dengan berbagai faktor penyebabnya. Konflik yang terjadi di Aceh bukan baru kemarin terjadi. Berikut faktor penyebab terjadi konflik di Aceh:

1. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Aceh: Perspektif Historis

Dalam lintasan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, Aceh merupakan wilayah yang memiliki kontribusi cukup besar bagi pertumbuhan Republik Indonesia. Aceh memiliki catatan yang panjang tentang perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Perjuangan Aceh dalam panggung revolusi nasional merupakan salah satu icon perjuangan yang paling menonjol dibandingkan daerah lainnya.

Selama masa revolusi fisik paska proklamasi kemerdekaan Aceh merupakan satu-satunya wilayah Republik Indonesia yang benar-benar merdeka dan tidak bisa diduduki kembali oleh Belanda. Bahkan, ketika terjadi Agresi Militer Belanda I bulan Juli tahun 1947 Aceh dijadikan sebagai daerah militer khusus dan Daud Beureueh ditunjuk sebagai gubernur militernya. Begitu pun ketika Agresi Militer Belanda II pada bulan Desember 1948, Aceh sekali lagi “menyelamatkan” muka Indonesia sebagai daerah Indonesia yang tidak bisa dijamah oleh Belanda dan membuktikan bahwa Indonesia masih eksis. Kenyataan sejarah ini menjadikan rakyat Aceh merasa memiliki posisi tawar yang lebih kuat terhadap pemerintah pusat.

Hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat menyajikan suatu gambaran yang unik dalam perjalanan sejarah politik Indonesia. Kekhasan sejarah dan kebudayaan masyarakatnya, menjadikan Aceh sebagai daerah khas yang harus dihadapi secara arif oleh pemerintah pusat, terutama pada masa-masa awal kemerdekaan.¹³

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Aceh merupakan sebuah komunitas yang unik dengan tradisi perlawanannya yang kental. Nasionalisme yang dikumandangkan sejak abad XX pun bahkan tidak mampu menyurutkan primordial ke-Acehan. Semangat primordial yang terpupuk oleh perlawanan yang terus-menerus sejak Belanda memaklumkan perang tahun 1873. Ini menjadi problem tersendiri dalam proses pembentukan *nation-state* Indonesia.¹⁴

Salah satu kenyataan yang sangat menonjol tentang perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat adalah bahwa pemberontakan itu meletus kurang dari empat tahun sesudah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada Desember 1949. Dengan memperhatikan besarnya sumbangan yang telah diberikan rakyat Aceh dalam perjuangan kemerdekaan, sebagai wujud kesetiaan mereka pada pemerintah pusat pada saat yang sangat kritis di masa revolusi, menjadi terasa mengherankan apabila ternyata mereka kemudian berbalik menentang Pemerintah Pusat segera setelah kedaulatan penuh tercapai.¹⁵

Sebagaimana tercatat dalam sejarah, pemberontakan Aceh babak pertama terjadi pada September tahun 1953, ketika Teungku Daud Beureueh mendeklarasikan Negara Islam Indonesia (NII). Pemberontakan Daud Beureueh, yang lebih dikenal dengan sebutan pemberontakan Darul Islam, merupakan embrio bagi gerakan separatis di Aceh pada masa-masa selanjutnya. Daud Beureueh, yang juga didukung oleh para pemimpin dan ulama Aceh, melakukan pemberontakan bukan tanpa sebab. Pemberontakan itu disebabkan oleh adanya perlakuan tidak adil itu dan rasa frustrasi yang telah meluas terhadap pemerintah pusat. Perlakuan tidak adil itu dirasakan sejak awal tahun 1950an, terutama sejak pemerintah pusat menggabungkan Aceh ke dalam propinsi Sumatera Utara, padahal pada bulan Desember tahun 1949 Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dipimpin Syafruddin Prawiranegara telah menetapkan Aceh sebagai propinsi¹⁶ untuk menggantikan status daerah militer sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa pada masa perjuangan revolusi kemerdekaan, rakyat Aceh telah dengan rela menyumbangkan harta mereka demi perjuangan Indonesia, sehingga berkat sumbangan itu Indonesia mampu membeli pesawat terbang yang kemudian diberi nama Seulawah RI-007 dan Dakota-

002.¹⁷ Selain itu, dengan janji-janji Presiden Soekarno bahwa jika perjuangan kemerdekaan selesai Aceh diperbolehkan menjalankan syariat Islam, maka sekali lagi rakyat Aceh, dengan dorongan dari Daud Beureuh, turut aktif mengambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Namun, pada masa paska kemerdekaan, janji bahwa Aceh dapat menjadi suatu wilayah tersendiri yang menegakkan syariat Islam, ternyata tidak dilaksanakan. Bahkan status otonomi Aceh yang diterima sejak tahun 1949 dihapuskan, sementara Daud Beureuh beserta pengikutnya yang menuntut otonomi khusus bagi Aceh sebagai alternatif agar Aceh tak digabungkan dengan propinsi Sumatera Utara malah dicurigai.¹⁸

2. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Aceh Periode DOM

a. Periode 4 Desember 1976-1989

Lahirnya gerakan *Acheh Sumatra National Liberation Front* (ASNLF), yang dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), diproklamkan oleh Hasan Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 di Pidie, telah menjadi Faktor penyebab terjadinya konflik babak kedua di Aceh. Menurut kelompok ini secara historis Aceh adalah suatu bangsa yang memiliki struktur sendiri. Kalaupun Aceh sekarang dibawah Indonesia, itu karena kesalahan Belanda, sebab sejak tahun 1873 bangsa Aceh diberi kemerdekaan oleh Inggris.¹⁹

Perbedaan persepsi historis ini, ditambah dengan adanya kegiatan eksplorasi alam besar-besaran di Aceh Utara dan Aceh Timur sejak awal tahun 1970an” yang merugikan rakyat Aceh karena penggusuran tanah, ganti rugi tanah yang tak sepadan, serta intimidasi, kemudian dijadikan modal kampanye oleh gerakan ini untuk menghasut rakyat agar melawan pemerintah dan berusaha memerdekakan diri. Hasan Tiro, sekembalinya dari Amerika pada awal Orde Baru, gencar menyerukan agar rakyat Aceh bergerilya melawan pemerintah. Ia mengaku telah mampu meyakinkan presiden Amerika, Nixon, untuk mendukung Aceh Merdeka. Kampanye Hasan Tiro mendapat dukungan para tokoh Aceh garis keras.

Selain itu, lahirnya gerakan Hasan Tiro ini juga disebabkan oleh pemberlakuan UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang juga diikuti oleh pencabutan UU No.18 tahun 1965. Pencabutan UU No.18 tahun 1965 sebagai salah satu perundangan yang memformalkan Aceh sebagai daerah istimewa, dipahami oleh rakyat Aceh sebagai pencabutan Aceh sebagai daerah istimewa.²⁰

Kaburnya pemimpin tertinggi GAM ke luar negeri dan suksesnya militer menumpas gerakan Aceh Merdeka bukan berarti padamnya gerakan pemberontakan. Bibit-bibit separatisme itu tetap bertahan walaupun tidak tampak di permukaan. Bibit-bibit separatisme itu mulai tampak berkecambah kembali tahun 1989 dengan membonceng gerakan-gerakan pengacau keamanan di wilayah industri Aceh Utara dan Aceh Timur. Kemunculan GPK ini bersamaan dengan menguatnya kembali tuntutan berbagai kalangan di Aceh untuk mendapatkan keadilan dalam proses pembangunan. Mereka memprotes dampak negatif dari menjamurnya industrialisasi di Aceh Utara dan Timur, seperti munculnya kemaksiatan, meningkatnya kriminalitas, dan sebagainya.

Tuntutan itu bukannya tanpa alasan. Tanah Aceh yang subur makmur dengan sumberdaya alamnya tidak dapat mereka nikmati, sebab sejak Repelita II kekayaan sumber daya alam Aceh dikuras untuk dibawa ke Jakarta, sementara sebagian besar rakyat Aceh malah hidup dalam kemiskinan, karena tidak dilibatkan dalam berbagai proses industrialisasi.²¹

Eskalasi rentetan peristiwa gangguan keamanan sejak tahun 1989 tersebut kemudian dipahami oleh elit penguasa lokal sebagai gangguan atas proses pembangunan yang sedang berjalan. Gubernur Aceh saat itu, Ibrahim Hasan, kemudian melaporkan kejadian-kejadian kekacauan di pusat-pusat industri di Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Timur, terutama setelah terjadinya penyerbuan markas ABRI ke pusat, dan meminta pusat mengirimkan pasukan ke Aceh. Kekuatan militer bersama mesin perangnya pun dikirim pemerintah Jakarta ke Aceh. Sejak Mei 1989 itulah, hingga Agustus tahun 1998, Aceh dijadikan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).²²

b. Periode DOM (1989-1998)

Pada masa DOM, pasukan yang ditugaskan ke wilayah Aceh yang bergolak adalah pasukan satuan organis (sebanyak 12 Kompi) dari Pangdam Bukit Barisan yang dibantu oleh Satgas Inteligen (Kopassus). Pasukan yang dikirim untuk mengamankan wilayah yang bergolak tersebut, dalam perkembangannya

mengalami penyimpangan dari apa yang seharusnya mereka lakukan. Selama DOM berlangsung, hukum tidak berlaku, sehingga keadilan sosial tidak bisa diwujudkan. Segala sesuatu ditentukan sesuai dengan kehendak dan selera militer; senapan dan sepatu laras. Tiga wilayah yang bergolak, yaitu Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur, merupakan wilayah yang paling menderita akibat kekerasan militer dan pelanggaran HAM. Ketidakmampuan aparat keamanan untuk membedakan antara rakyat biasa, GPK, maupun GAM menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Aceh.

Pemberlakuan DOM dianggap oleh orang Aceh sebagai rencana sistematis dan rekayasa politik pemerintah Soeharto, untuk menghancurkan mereka, dengan tujuan akhir agar Aceh tetap loyal dan takluk pada Pemerintah Pusat, dan kekayaan Aceh dapat dikuras dengan mudah. Agar Aceh tampak kacau, maka diberlakukanlah DOM. Kepentingan politik Soeharto tampaknya juga memegang peranan dalam pemberlakuan DOM di Aceh. Sudah sekian lama dalam pemilu Orde Baru, Golkar tidak pernah memenangkan pemilu di Aceh, sehingga melalui gubernur Aceh militer diundang masuk ke Aceh untuk melakukan cara-cara yang memungkinkan kemenangan Golkar, dengan dalih keamanan dan rentannya Aceh karena ada kelompok yang ingin mendirikan Negara Islam.²³ Kondisi ini pada akhirnya telah melahirkan kesadaran ideologis rakyat Aceh untuk melakukan sebuah perlawanan. Faktor yang mempengaruhi munculnya kesadaran politik menjadi kesadaran ideologis rakyat Aceh antara lain karena adanya berbagai intervensi pusat dalam bentuk penyeragaman politik dan kekerasan oleh negara, dan catatanū-catatan duka masa lalu, diantaranya berbagai kebohongan pemerintah pusat kepada rakyat Aceh kurun waktu Daud Beureueh, serta adanya eksploitasi sumberdaya alam. Hal-hal tersebut menimbulkan dendam kolektif rakyat Aceh yang meledak setelah DOM dicabut.

3. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Aceh Periode Paska DOM

Status DOM Aceh dicabut pada tanggal 7 Agustus 1998 (masa pemerintahan Presiden Habibie). Begitu DOM dicabut yang bertepatan pula dengan bergulimnya reformasi di Indonesia kondisi bukannya membaik, tetapi justru wilayah konflik bertambah luas. Jika pada kuartal pertama tahun 1999 wilayah konflik dan kekerasan hanya terjadi di tiga kabupaten, yaitu Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur, maka memasuki kuartal kedua tahun 1999 dan selanjutnya, maka wilayah konflik meluas menjadi 9 kabupaten/Dati II (termasuk dua kabupaten/Dati II yang baru dibentuk). Wilayah konflik baru tersebut, di samping tiga kabupaten/Dati II di atas, adalah kabupaten/Dati II Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Aceh Tengah, serta kabupaten/Dati II Aceh Singkil dan Aceh Jeumpa yang baru dibentuk. Dari 13 kabupaten/Dati II yang ada di Aceh, hanya Kodya Sabang (Pulau Weh) dan Kabupaten Simeulue (Pulau Simeulue) yang relatif aman. Relatif amannya kedua wilayah ini tidak terlepas dari terpisahnya keduanya dari daratan Aceh.

Perluasan wilayah konflik di Aceh tentu saja sangat kontradiktif dengan upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus Aceh. Sebenarnya berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah, dengan menerapkan berbagai kebijakan paska DOM maupun upaya perundingan dengan pihak GAM, namun hingga sekarang belum juga ada titik temunya.

Dicabutnya status DOM di Aceh sebetulnya merupakan angin segar bagi masyarakat. Apalagi, ketika DOM dicabut, Wiranto meminta maaf kepada seluruh rakyat Aceh atas apa yang telah terjadi selama berlakunya DOM. Walaupun permintaan maaf itu bagi rakyat Aceh kurang etis, tidak sesuai dengan kultur mereka, rakyat Aceh berusaha untuk bisa menerima. Tetapi anehnya, tampaknya militer tidak mau pisah dengan Aceh. Terbukti dengan diadakannya operasiū. Operasi militer baru, di Aceh paska DOM. Luka rakyat Aceh akibat DOM sangat mendalam dan belum sembuh semakin terluka dengan operasi-operasi militer paska DOM tersebut, sehingga muncul konflik yang lebih baru dan kompleks.

Gerakan di Aceh paska DOM dimotori oleh mahasiswa dengan salah satu agendanya menuntut kemerdekaan. Tuntutan merdeka ini sebenarnya hanya sebagai strategi agar pemerintah Jakarta memperhatikan mereka, sebab tuntutan mereka yang sebenarnya adalah pengadilan atas korban-korban DOM. Karena tuntutan mereka tidak direspon dengan baik, maka gerakan ini makin meluas, sehingga pada 1999 mereka mengangkat dua isu penting, yaitu merdeka atau referendum.

Kondisi demikian merupakan momentum yang tepat bagi pertumbuhan dan meluasnya pengaruh GAM paska DOM. Jika pada saat DOM dicabut basis GAM hanya ada di Aceh Utara, Pidie, dan Aceh

Timur, maka pada tahun 2001 pengaruh GAM sudah meliputi sekitar 70-80% wilayah Aceh termasuk Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, dan bahkan Sabang. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak siap mengantisipasi kondisi Aceh paska DOM, sehingga tidak ada upaya rehabilitasi ekonomi, sosial, dan penegakan hukum bagi korban-korban DOM.

Dalam hal ini kata kunci utamanya adalah ketidakadilan dalam berbagai aspek, seperti: ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Pergantian kepemimpinan nasional dari Habibie, Abdurrahman Wahid, dan selanjutnya ke Megawati, serta kondisi politik yang labil sangat mempengaruhi keseriusan pemerintah dalam penyelesaian Aceh. Perbedaan pandangan dan pendapat antara DPR dengan pemerintah dalam upaya mencari solusi konflik juga semakin memperburuk situasi. Sepertinya mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab, atau setidaknya mereka tak punya *sense of crisis dan sense of belonging*.²⁴ Bahkan, tampak sepertinya konflik Aceh itu memang tidak akan diselesaikan. Ada kepentingan-kepentingan tertentu terhadap konflik Aceh yang membuat konflik tersebut tampak seperti sengaja dipelihara.

Keraguan pemerintah di dalam upaya penanganan konflik Aceh justru menyebabkan terkikisnya kepercayaan rakyat Aceh terhadap pemerintah. Kenyataan pahit yang terlalu banyak dialami oleh rakyat Aceh belum bisa diobati, sehingga persepsi mereka terhadap pemerintah Jakarta pada paska DOM pun belum berubah. Kesalahan-kesalahan kebijakan pemerintah pusat dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah Aceh semakin menjauhkan Aceh dari kondisi damai. Sebenarnya masyarakat awam di Aceh masih percaya pada pemerintah pusat, tetapi pusat justru menyerahkan persoalan Aceh pada militer. Hal ini menimbulkan keputusasaan rakyat Aceh, sehingga mereka merasa tidak punya lagi harapan pada pemerintah. Kondisi ini ternyata dimanfaatkan oleh GAM. GAM menjual ide-ide kemakmuran, kesejahteraan, sehingga rakyat sangat tertarik.

Tarik-menarik antara pihak-pihak tertentu dalam konflik Aceh paska DOM mengakibatkan timbulnya polarisasi di dalam masyarakat Aceh. Polarisasi itu mewakili dan mencerminkan keinginan dan kepentingan yang berbeda, yang teridentifikasi sebagai masyarakat korban, masyarakat birokrat, dan masyarakat agama. Polarisasi itu pula yang kemudian membentuk pola pergerakan di Aceh, dimana ada yang ingin merdeka, referendum, dan otonom. Dari berbagai pilihan itu, sebagian besar rakyat Aceh memilih referendum yang dianggap sebagai bentuk dan sikap yang demokratis.

Agar persoalan Aceh betul-betul dapat diselesaikan, maka yang harus ditempuh adalah jalan damai. Sejarah mencatat bahwa pendekatan militer tidak pernah berhasil menyelesaikan masalah Aceh. Kekerasan yang dilawan dengan kekerasan justru menimbulkan kekerasan baru yang lebih kompleks. Selain itu, iktikad baik dan serius dari Pemerintah Pusat juga menjadi kunci pokok bagi penyelesaian konflik Aceh. Satu hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah perbaikan sistem di Aceh, baik sistem pendidikan, hukum, ekonomi dan sebagainya. Keseriusan pemerintah untuk melakukan rehabilitasi korban DOM, memperbaiki ekonomi rakyat Aceh, dan membangun kembali Aceh, akan menjadi pintu gerbang untuk menciptakan Aceh yang damai.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran MPU dalam politik pemerintahan di Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu peran sebagai pemberi pertimbangan kepada pemerintah kota Lhokseumawe. MPU berfungsi secara optimal dalam memberikan pertimbangan/pertimbangan/usul/saran kepada pemerintah daerah. MPU mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, kemudian hasil pengawasan dapat dikeluarkan dalam bentuk fatwa hukum yang diserahkan kepada pemerintah daerah dan juga disosialisasikan kepada masyarakat. Secara normatif pertimbangan-pertimbangan MPU yang disampaikan kepala daerah tidak terikat, namun sangat dipengaruhi atas kesadaran kepala daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggungjawab sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak dan kualitas pertimbangan yang disampaikan oleh MPU yang menyebabkan setiap elemen dan satuan dalam pemerintahan Kota Lhokseumawe

- harus menerimanya. Untuk mewujudkan fungsi MPU sebagai Mitra sejajar dengan pemerintah daerah dan DPRD, dibuat ketentuan yang tegas dalam qanun, sehingga jelas makna kedudukan hubungan MPU dengan lembaga daerah lainnya dalam pelaksanaan otonomi khusus, sehingga tidak ada peluang untuk mengabaikan lembaga MPU terutama keterlibatan mereka dalam politi pemerintahan
2. Efektivitas peran politik ulama MPU dapat dilihat dari peran yang sangat penting di dalam menyertai perjalanan panjang konflik dan perdamaian Aceh khususnya pada tahun 1999 hingga 2006 sampai sekarang. Masyarakat sangat antusias dan menyambut baik keterlibatan MPU dan memandang bahwa MPU berperan aktif dalam mengkomunikasikan pesan-pesan perdamaian dengan berbagai keinginan dari pihak-pihak yang bertikai. MPU merupakan wadah yang sangat strategis dalam membangun jaringan dan komunikasi antar organisasi lain dalam membangun kepercayaan (*trust building*) masyarakat dalam penyelesaian konflik Aceh. Ide dan gagasan yang dikomunikasikan oleh MPU senantiasa menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan oleh pemerintah maupun GAM. Mulai tahun 1999 hingga tahun 2006 ulama MPU dan Ulama lainnya melakukan berbagai upaya untuk menemukan titik puncak penyelesaian secara objektif dan konprehensif
 3. Kebijakan politik ulama MPU Kota Lhokseumawe dalam penyelesaian konflik Aceh dimulai sejak wacana referendum pada tahun 1999. Keterlibatan dan peran ulama MPU dilandasi oleh faktor yang sangat didambakan oleh segenap lapisan masyarakat Aceh, yaitu tuntutan keadilan dan penerapan syariat Islam. Sebagai pihak yang menjadi rujukan ulama lebih netral dan tidak memihak ke pada salah satu pihak yang berkonflik.
 4. Sistem pendekatan yang dibangun oleh ulama MPU dalam penyelesaian konflik Aceh yaitu dengan menggunakan pendekatan komunikasi persuasif dalam upaya mengajak para pihak yang bertikai GAM dan RI. Serta elemen sipil lainnya. Sistem komunikasi persuasif yang sering disampaikan ketika pertemuan dengan tokoh GAM dan RI dengan mengaitkan dengan pesan-pesan Islam. Efektifitas politik Ulama MPU juga terlihat dari seringnya dilakukan rapat koordinasi pada setiap ada persoalan baik internal organisasi maupun eksternal organisasi. Disamping itu pula Ulama MPU memiliki akses komunikasi politik yang kuat dengan berbagai pihak dalam upaya penyelesaian konflik. Pada masa Cressation of Hostilities Agreement (CoHa), ulama MPU mengambil posisi yang sedikit lebih hati-hati, tidak terlalu berani maju ke depan. Peran ulama lebih banyak dirasakan oleh masyarakat bawah sebagai pengayom dan pedamping masyarakat. Masa MoU Helsinki dan UUPA, pada tanggal 8-9 April 2005, ulama MPU dan bersama 600-an ulama se-Aceh guna melakukan silaturahmi dan musyawarah di gedung AAC Dayan Dawood yang menghasilkan 11 rekomendasi ulama. Setelah ditandatanganinya perjanjian damai, maka kedua belah pihak menyepakati untuk membahas draft Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagaimana yang diamanatkan oleh MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

(Endnotes)

¹ Aceh sebagai serambi makkah dikonsolidasikan pada zaman Sultan Iskandar Muda berkuasa, (1016-1046 H), atau (1607-1637 M). Taufik Abdullah, "Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara Sebuah Perspektif Perbandingan, dalam Taufik Abdullah dan Sharan Shiddiqi, *Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 79.

² A. H. Johan, "Islam in Southeast Asia : Reflectionalnd New Directionisi Indonesia", *Comet Modern Indonesia Project*, 1975, h. 45. Bandingkan, Ahmad Daudy, *Allah dan Manusia dalam konsepsi Syeikh Nuruddin Ar-Raniry*. (Jakarta : Rajawali Pers, 1983), h. 8.

³ Hamzah Al-Fansuri dan Syamsuddin al-Sumatrani, misalnya menjadi "Syaykh al Islam" pada masa Sultan Iskandar Muda berkuasa dan sering menjadi duta perdamaian dan misi dagang antara pihak Inggris dengan pihak Aceh pada tahun 1011/1602. Demikian juga Nuruddin al-Raniry menjadi

“Syaykh al-Islam” pada masa Sultan Iskandar Tsani berkuasa. Lihat, Azyumardi Azra, Jaringan ulama Timur Tengah, Kepulauan Nusantara Abad XII dan XVIII, Melacak Akar-Akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia (Bandung : Mizan, 1995), h. 167-179.

⁴ Pluralitas ke-Acehan adalah tradisi Aceh itu sendiri, ditampilkan dalam berbagai wajah, baik suku, etnis dan bahasa. Terlalu sulit untuk mengatakan bahwa Aceh memiliki satu identitas tunggal-mayoritas. Bahkan pasca Perang Aceh pemerintah Hindia Belanda melakukan sensus, ternyata penduduk Aceh masih sangat plural dengan total 1.002.900. yang terdiri dari 3.251 orang Eropa, 976.265 Aceh, yang itu terdiri beragam suku yang telah lama hidup bersandingan, baik itu suku Aceh, Jame, Gayo, Tamiang dan lain-lain, 21.649 Cina dan 1.735 Timur Asing. Padahal pada tahun 1905, yaitu usai Perang Aceh, jumlah penduduknya hanya 570.000 jiwa. Di zaman Kesultanan Aceh, jumlah penduduk di seluruh Aceh sekitar setengah juta jiwa. Baca H. Rosihan Anwar, Perkisahan Nusa: Masa 1973-1986, (Jakarta: Pustaka Gratifipers, 1986) h. 3.

⁵ Islam sebagai gagasan dan menjadi agama mayoritas di Nusantara menggunakan Aceh sebagai pintu gerbangnya. Banyak perdebatan mengenai kedatangan awal Islam di nusantara, akan tetapi itu semua mengkristal bahwa Aceh adalah daerah pertama di Nusantara yang menerima Islam. banyak pengamat mengatakan bahwa Islam sudah disebarkan di Aceh pada abad Pertama Hijriah. Ini ditandai dengan adanya makam Sultan Kerajaan Pasai, Malikul Shalih tahun 698/1297, meskipun banyak sarjana bersepakat bahwa Islam di Nusantara disebarkan pada abad 12-13 Masehi. Untuk lebih jelas kedatangan awal Islam di Nusantara baca Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII&XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia (Jakarta:Kencana, 2004) h. 5-19.

⁶ Penyebaran Islam di Nusantara menjadi kajian yang tetap menarik sampai kapanpun oleh para peneliti keindonesiaan. Meneliti Islam, di Indonesia tidak akan pernah bisa dilepaskan dari keberadaan kerajaan Aceh tempo dulu yang telah memberikan peran sentral terhadap pengislaman nusantara, walau Kerajaan Aceh seperti Samudera Pasai pernah mendapat serangan dari kerajaan Hindu-jawa Majapahit tahun 1380, akan tetapi dapat tetap terus eksis dan memberikan sumbangan berarti bagi perkembangan Islam, ini dibuktikan dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Demak. Baca Saifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangan Islam di Indonesia, (Bandung: Alma'arif) hal. 194-213. Untuk proses penyebaran Islam di daerah lain baca juga H.M.Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara, (Medan: Iskandar Muda, 1961) hal. 250-262. Penyebaran Islam dari Aceh ke Nusantara tetap memakai cara damai, sama seperti ketika Islam pertama kali datang ke Aceh. Ditambah pada saat penyebaran, kerajaan Hindu seperti Sriwijaya dan Majapahit sedang mengalami kemunduran hebat karena berbagai krisis politik. Sehingga penerimaan Islam dibagian Nusantara lain bersifat akomodatif dan kompromis. Karakteristik utama penyebaran Islam di Nusantara ditandai dengan transformasi intelektual, yang akhirnya membentuk benang merah tradisi ilmiah dan jaringan ulama Nusantara. Baca Azyumardi Azra, Jaringan Ulama...h. 197-259

⁷ Religius Progressif yang dimaksud di sini adalah kemampuan dari ulama-ulama Aceh dalam menterjemahkan tradisi keilmuan dari Timur Tengah yang memiliki ciri khas tersendiri, dengan karakteristik budaya setempat. Sehingga muncul tipologi keberagamaan yang akomodatif dan kompromis. Ini dapat dilihat dari hidupnya tradisi tasawuf yang sampai kini tetap menjadi khas dalam warna keberagamaan di seluruh nusantara. Untuk masalah ini baca Azyumardi Azra, Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara, (Bandung: Mizan, 2002) hal. 110-133. Ulama Aceh, seperti Nuruddin Ar-raniry yang berhasil membangun tradisi ilmiah lokal yaitu dengan menghasilkan karya-karya bermutu dengan memakai bahasa Arab-Jawi, bahasa yang dekat dengan kebudayaan masyarakat Aceh. Salah satu karya utamanya adalah Bustan Al-Salatin, Hidayat al-Habib fi al targhib wa Al Tartib. Lihat Azyumardi Azra, Jaringan Ulama...h. 225.

⁸ MPU Prov. NAD, Kumpulan Fatwa-fatwa Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, (Banda Aceh : MPU Prov. NAD, 2004), h. 7.

⁹ Muslim Ibrahim, Rekonstruksi Peran Ulama Aceh Masa Depan, dalam Fairus M. Nur Ibr, (ed.), Syari'at di Wilayah Syari'at : Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam : Dinas Syari'at Islam, 2002), h. 248.

¹⁰ Lucian Pye, dalam Hafied Cangara, Komunikasi Politik: konsep, teori, dan strategi (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.16

¹¹ Ibid., h. 16-17.

¹² Taufik Abdullah. Islam dan Masyarakat, (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 18.

¹³ Nazaruddin Syamsuddin, Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), h. 1.

¹⁴ Agus Sudibyo, Realitas Aceh dan Realitas Media, dalam Kompas, 11 Juni 2003.

¹⁵ Ibid., h. 102.

¹⁶ Ahmad Syafi'i Ma'arif, Drama di Tanah Rencong: Dosa Kolektif, Dalam Abdul Wachid B.S., Fikar W. Eda, dan Ilian Sahar (eds.), Aceh Mendesah Dalam Nafasku: Bunga Rampai Menyemai Bumi Tumpah Darah, (Banda Aceh: Penerbit kaSUHA, 1991), h. 233.

¹⁷ Tim Peneliti LIPI, Bara Dalam..., h. 33.

¹⁸ Ibid., h. 34.

¹⁹ Usman Hasan, Konflik Aceh yang Multidimensional dan Penyelesaiannya Secara Damai, dalam Musni Umar (ed), Aceh Win-win Solution, h. 86.

²⁰ Soedarsono dan Arif Rusli, Sejarah Hasan Tiro dan GAM, dalam Forum Keadilan, 25 Januari 1999.

²¹ Gazali Abbas Adan, Win-win Solution Penyelesaian Aceh, dalam Musni Umar (ed),, h. 87.

²² Marulli Tobing, Jejak Lahirnya Konflik Aceh-GAM, dalam Kompas, 14 Januari 2000.

²³ Republika, 13 November 2003.

²⁴ Jony Lumintang, Republika, 21 November 2000.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, *“Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara Sebuah Perspektif Perbandingan, dalam Taufik Abdullah dan Sharan Shiddiqi, Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, (Jakarta: LP3ES, 1989)*
- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat, (Jakarta: LP3ES, 1987)*
- Azra, Azyumardi, *Jaringan ulama Timur Tengah, Kepulauan Nusantara Abad XII dan XVIII, Melacak Akar-Akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia (Bandung : Mizan, 1995)*
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII&XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia (Jakarta:Kencana, 2004)*
- Anwar, H. Rosihan, *Perkisahan Nusa: Masa 1973-1986, (Jakarta: Pustaka Gratifipers, 1986)*
- Adan, Gazali Abbas, *Win-win Solution Penyelesaian Aceh, dalam Musni Umar (ed),,*
- Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik: konsep, teori, dan strategi (Jakarta: Rajawali Press, 2009)*
- Daudy, Ahmad, *Allah dan Manusia dalam konsepsi Syeikh Nuruddin Ar-Raniry. (Jakarta : Rajawali Pers, 1983)*
- Hasan, Usman, *Konflik Aceh yang Multidimensional dan Penyelesaiannya Secara Damai, dalam Musni Umar (ed), Aceh Win-win Solution.*

- Ibrahim, Muslim, Rekonstruksi Peran Ulama Aceh Masa Depan, dalam Fairus M. Nur Ibr, (ed.), *Syari'at di Wilayah Syari'at : Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam : Dinas Syari'at Islam, 2002)
- Johan, A. H. "*Islam in Southeast Asia : Reflectional Ind New Directionisi Indonesia*", (Cornet Modern Indonesia Project, 1975)
- Ma'arif, Ahmad Syafi'I, Drama di Tanah Rencong: Dosa Kolektif, Dalam Abdul Wachid B.S., Fikar W. Eda, dan Ilihan Sahar (eds.), *Aceh Mendesah Dalam Nafasku: Bunga Rampai Menyemai Bumi Tumpah Darah*, (Banda Aceh: Penerbit kaSUHA, 1991)
- MPU Prov. NAD, *Kumpulan Fatwa-fatwa Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh : MPU Prov. NAD, 2004)
- Syamsuddin, Nazaruddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990)
- Sudibyo, Agus, *Realitas Aceh dan Realitas Media*, dalam Kompas, 11 Juni 2003.
- Soedarsono dan Arif Rusli, *Sejarah Hasan Tiro dan GAM*, dalam *Forum Keadilan*, 25 Januari 1999.
- Tobing, Marulli, *Jejak Lahirnya Konflik Aceh-GAM*, dalam Kompas, 14 Januari 2000.
- Zuhri, Saifuddin, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangan Islam di Indonesia*, (Bandung: Alma'arif)
- Zainuddin, H.M., *Tarich Atjeh dan Nusantara*, (Medan: Iskandar Muda, 1961)
- Republika, 13 November 2003.
- Jony Lumintang, Republika, 21 November 2000.

